

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Muhammad Askin, *Seluk Beluk Hukum Lingkungan*, Nekamantra, Jakarta, 2010

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I)*, BKBH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2001

Dodik Ridho Nurrochmat, *Strategi Pengelolaan Hutan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005

Policy Scientist pada Center for Internasional Forestry Research (CIFOR)

Hidayati D, Rahmi, Charles CH, Tambunan, Nugraha, Agung; Aminuddin, Iwan. *Pemberantasan Illegal Logging Dan Penyelundupan Kayu*, Wana Aksara, Tangerang, 2006

Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education dan Pukat., Yogyakarta, 2012

-----, dkk. *Asas-Asas Hukum Pidana II*. Rangkang Education dan Pukat. Yogyakarta: 2012

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

M.Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002.

Moeljatno, *Asas- asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Mudzakkir, Dr SH., MH., “*Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana (Kesalahan) makalah disampaikan pada Rapat Kerja Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Nasional*, Semarang, 18-20 Oktober 1994.

Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, :2011

Rubah Masruchin, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM Press. Malang, 2001

R. Tresna. *Asas-asas Hukum Pidana*, Universitas Padjajaran Bandung, 1959.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Rahmi Hidayanti,dkk, *Pemberantasan Illegal logging dan Penyelundupan Kayu*, Wana Aksara,

Tangerang, 2006,*Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Siti Sutami, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Karunika Universitas
Terbuka, Jakarta, 1987, hal. 11

Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Salim H, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

B. Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan hutan

Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Umum

Kehutanan Negara (Perum Perhutani).

Keputusan Presiden No. 41 Tahun 2004 tentang Perizinan Atau Perjanjian Di Bidang Pertambangan

Yang Berada di Kawasan Hutan.

Intruksi Presiden No,4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di

Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah RI.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-Li/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan

Asal Usul Kayu (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak

Menteri Kehutanan.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 75/Menhut-II/2014

C. Lain-Lain

Majalah / Koran

Kompas , tanggal 23 Pebruari 2005

Kompas , com/read/2012/06/2003013449/Perhutani Makin Kewalahan , diakses tanggal 1 Oktober 2014`

Internet

¹ Bambang Setiono (b.setiono@cgiar) adalah *analisa kebijakan keuangan* dan Christopher Barr (c.barr@cgiar.org) adalah *Policy Scientist* pada Center for Internasional Foresty Research (CIFOR)

¹<http://agamadanekologi.blogspot.com/2007/03/pengelolaan-hutan-berdasarkan-syariah.html>.Diakses tanggal 22 Maret 2015 jam 22.00..